

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki peran strategis dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, kota ini menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti kemacetan, banjir, polusi, kemiskinan, serta ketimpangan sosial yang cukup tinggi. Tantangan ini menuntut adanya kepemimpinan yang efektif serta kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Jika kita bicara permasalahan banjir, menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2010) menyatakan bahwa banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sangat bertalian erat dengan banyaknya faktor-faktor, seperti pembangunan fisik di kawasan tangkapan air di hulu yang kurang tertata dengan baik, laju urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan perekonomian dan terjadinya perubahan iklim global. Lebih lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa sejak era pemerintahan kolonial Belanda pun sudah sangat dipusingkan dengan permasalahan banjir ini dan juga permasalahan lainnya seperti tata kelola air di Jakarta. Kemudian hanya berselang sekitar dua tahun saja setelah Batavia dibangun sekitar tahun 1621 lengkap dengan system kanalnya, kota ini mengalami banjir kembali. Kemudian banjir besar terjadi kembali pada tahun 1918 yang membuat hampir seluruh kota tergenang air. Berdasarkan laporan pada saat itu ketinggian air banjirnya adalah sekitar satu meter atau sekitar setinggi dada orang dewasa. Salah satu upaya dari penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial Belanda saat itu adalah dengan membangun saluran air yang disebut sebagai Banjir Kanal Barat pada tahun 1922. Pembangunan Banjir Kanal Barat ini merupakan ide dari seorang ahli tata kelola air, yaitu Herman van Breen.

Menurut Direktorat Pengairan dan Irigasi menyatakan bahwa terjadinya serangkaian banjir dalam waktu yang relatif pendek dan terulang setiap tahunnya, menuntut upaya lebih besar untuk mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat

diminamalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (*structural approach*), pada kenyataannya masih jauh untuk dapat menanggulangi masalah banjir di DKI Jakarta. Upaya dalam penanggulangan banjir ini di DKI Jakarta ini selama ini lebih berfokus kepada penyediaan bangunan-bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak dari bencana banjir.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pada tingkat lokal (perkotaan) maupun nasional (negara), bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup ini diukur dari sejauh mana kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Manik (2018) dalam bukunya menyatakan bahwa kelangsungan hidup manusia tidak hanya bergantung pada aspek material yang sering diukur dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor biologis, spiritual, serta sosial-budaya. Lebih lanjut, Manik (2018) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi melalui intervensi manusia atau perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun, dalam praktiknya, pembangunan selalu membawa dampak terhadap lingkungan, baik dalam bentuk efek positif maupun negatif.

Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2010), wajah Jakarta telah mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 1920-an. Perubahan ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, perluasan kawasan permukiman, serta perkembangan sektor industri dan perdagangan. Sebelumnya, air hujan yang turun dapat terserap ke dalam tanah dan sisanya mengalir secara alami ke sungai. Namun, dengan meningkatnya pembangunan fisik yang mengurangi kawasan resapan air, air hujan kini langsung dialirkan ke sungai dan saluran drainase sebelum akhirnya bermuara ke laut. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa selain permasalahan banjir, pengelolaan air secara keseluruhan baik dari segi jumlah, kualitas, maupun distribusinya menjadi tantangan yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian lebih. Para ahli telah lama memperingatkan bahwa tata kelola air yang buruk dapat menjadi penyebab utama berbagai masalah lingkungan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan seperti DKI Jakarta.

Kepemimpinan di tingkat daerah, khususnya gubernur DKI Jakarta, memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan perkotaan. Model komunikasi politik yang diterapkan oleh pemimpin daerah menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Model komunikasi politik ini berpengaruh pada bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta menjalankan kebijakan secara efektif. Namun, studi mengenai bagaimana perbedaan model komunikasi ini mempengaruhi efektivitas kebijakan masih terbatas. (eldi, (2021)

Jakarta menempati peringkat ke-29 dari 389 kota di seluruh dunia sebagai kota dengan jalan raya termacet (evandiaz, 2023). Kemacetan di Jakarta sudah menjadi masalah krusial yang berdampak menimbulkan permasalahan lainnya pada bidang Kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan. Pertumbuhan populasi juga menjadi peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan melonjak jumlah kendaraan yang bisa ditemui di jalan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemacetan (Soehodho, 2017). Urbanisasi yang tidak terkendali dan kurangnya perencanaan perkotaan yang baik dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang parah (Nugroho, 2019). Dengan meningkatnya mobilitas kendaraan yang beroperasi di jalan menjadikan Jakarta sebagai kota pusat perekonomian dan perdagangan yang paling padat di Indonesia sehingga seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas di hampir setiap ruas jalan. Tentunya kemacetan lalu lintas yang terjadi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pengguna jalan, antara lain peningkatan kebisingan dan polusi udara, penurunan kenyamanan lalu lintas, serta peningkatan pemborosan bahan bakar dan energi. Kemacetan adalah pemborosan terbesar dalam kehidupan perkotaan. Kondisi ini tidak hanya menghancurkan waktu dan energi, tetapi juga merusak kualitas udara dan kesehatan manusia (TomTom Traffic Index, 2023).

Permasalahan yang terjadi di Jakarta memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan kota, terutama dalam era reformasi yang telah melahirkan berbagai pemimpin dengan latar belakang, karakter, dan model kepemimpinan yang berbeda. Salah satu periode yang menarik untuk dikaji adalah kepemimpinan Anies

Baswedan dan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Kedua pemimpin ini memiliki model komunikasi politik yang berbeda, yang secara langsung memengaruhi kebijakan serta hubungan dengan masyarakat dan pemerintah pusat.

Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang *memiliki* visi besar dalam membangun Jakarta. Model komunikasinya bersifat partisipatif, dengan pendekatan yang inklusif melalui berbagai kanal media, terutama media sosial. Ia aktif menyampaikan narasi tentang perubahan dan pembangunan kota yang lebih manusiawi serta berkeadilan. Retorika dan storytelling menjadi bagian utama dalam strategi komunikasinya, yang berhasil membangun hubungan erat dengan masyarakat. Misalnya, dalam program revitalisasi transportasi publik dan pembangunan kampung kota, ia sering melibatkan warga melalui diskusi publik dan media sosial.

Sebaliknya, Heru Budi Hartono, yang berlatar belakang birokrat, cenderung menerapkan model komunikasi politik yang lebih teknokratis dan administratif. Sebagai seorang pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, Heru lebih mengedepankan komunikasi yang bersifat top-down dengan fokus pada efektivitas birokrasi. Model komunikasi ini lebih banyak dilakukan melalui jalur resmi, seperti rapat koordinasi dengan jajaran pemerintahan dan pengumuman kebijakan melalui media konvensional. Hal ini terlihat dalam program penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur, yang dilakukan melalui koordinasi internal tanpa banyak keterlibatan publik.

Perbedaan model komunikasi politik ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan serta penerimaan publik. Anies Baswedan, dengan gaya komunikasinya yang lebih terbuka, berhasil membangun interaksi langsung dengan masyarakat dan menciptakan kesan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi warga. Namun, pendekatan ini juga mengundang kritik karena sering kali dinilai lebih bersifat populis daripada teknokratis. Beberapa kebijakan yang diusung, seperti naturalisasi sungai, mendapat tantangan dalam implementasi karena pendekatan komunikasinya yang tidak selalu selaras dengan birokrasi pemerintahan pusat.

Sementara itu, Heru Budi yang lebih berorientasi pada kestabilan administrasi dan koordinasi pemerintahan menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun komunikasi publik yang efektif. Meskipun pendekatannya memastikan kesinambungan kebijakan yang telah berjalan, model komunikasi yang cenderung formal dapat menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan. Misalnya, dalam beberapa kebijakan transportasi dan tata ruang, keterbatasan komunikasi langsung dengan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman publik terhadap kebijakan yang diambil.

Konteks politik dan hubungan dengan pemerintah pusat juga turut memainkan peran dalam membentuk model komunikasi kedua pemimpin ini. Anies Baswedan, yang dikenal memiliki relasi politik yang dinamis dengan pemerintah pusat, sering menghadapi tantangan dalam menyampaikan kebijakan yang berbeda dengan arah kebijakan nasional. Di sisi lain, Heru Budi memiliki hubungan yang lebih harmonis dengan pemerintah pusat, yang mempermudah proses koordinasi dan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Selain itu, pengaruh media dalam komunikasi politik juga menjadi faktor penting dalam perbedaan model komunikasi kedua pemimpin ini. Anies Baswedan memanfaatkan media sosial sebagai platform utama dalam membangun narasi politik dan menyebarkan kebijakan, yang memungkinkan interaksi dua arah dengan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, ia menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, merespons isu-isu aktual, serta membangun citra kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Sebaliknya, Heru Budi lebih mengandalkan media resmi dan konferensi pers sebagai saluran komunikasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan birokratis yang lebih menitikberatkan pada efektivitas kebijakan daripada membangun interaksi langsung dengan publik. Meskipun strategi ini lebih terstruktur, pendekatan ini cenderung kurang fleksibel dalam menanggapi dinamika politik dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan model komunikasi politik yang diterapkan oleh Anies Baswedan dan Heru Budi Hartono dalam membangun Jakarta. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana

komunikasi politik memengaruhi persepsi publik, efektivitas kebijakan, serta hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan memahami karakteristik model komunikasi masing-masing pemimpin, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika kepemimpinan di pemerintahan daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi politik, serta bagaimana perbedaan model komunikasi ini berdampak pada implementasi kebijakan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemimpin daerah dalam menerapkan strategi komunikasi yang lebih efektif guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan daerah Jakarta, tetapi juga memberikan kontribusi bagi studi komunikasi politik dan kepemimpinan di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi komunikasi politik dapat membantu pemimpin daerah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam upaya mengidentifikasi perbandingan model kepemimpinan antara Gubernur Anies Baswedan dan Pj. Heru Budi dalam membangun Jakarta, penting untuk merumuskan masalah secara tepat guna menemukan hasil kajian yang konkret dan relevan dengan pembahasan. Salah satu fokus utama penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan model komunikasi politik serta pola kepemimpinan antara kedua tokoh tersebut. Pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah: apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan model komunikasi politik Anies Baswedan dan Heru Budi dalam membangun Jakarta? Analisis ini akan membantu mengungkap pola komunikasi politik dan kepemimpinan yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin serta dampaknya terhadap pembangunan kota Jakarta.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis model komunikasi politik yang diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan Pj. Gubernur Heru Budi dalam mengelola pembangunan di Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan pendekatan model komunikasi politik Anies Baswedan yang dikenal lebih visioner dan populis dengan model komunikasi politik Heru Budi yang cenderung teknokratis dan administratif, terutama dalam menghadapi berbagai isu perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana perbedaan model komunikasi politik kedua tokoh tersebut memengaruhi keberhasilan program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Jakarta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang teori komunikasi politik, khususnya dalam konteks kepemimpinan di pemerintahan daerah. Dengan adanya perbandingan antara model komunikasi politik Gubernur Anies Baswedan dan Pj. Heru Budi, penelitian ini akan membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana model komunikasi politik serta pola kepemimpinan yang berbeda dapat memengaruhi proses pembangunan di sebuah wilayah perkotaan seperti Jakarta. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi politik dan kepemimpinan di Indonesia, terutama terkait dengan pengaruh personalitas dan strategi kepemimpinan dalam konteks pemerintahan daerah.

b. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, terutama pemerintah daerah, dalam memahami dampak dari berbagai model komunikasi politik serta pola kepemimpinan terhadap pembangunan wilayah. Dengan menganalisis model komunikasi politik

Anies Baswedan dan Heru Budi, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pejabat publik, birokrat, maupun politisi tentang bagaimana memilih atau mengadopsi model komunikasi politik yang paling efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan kota. Hasilnya juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemimpin daerah lainnya dalam menerapkan strategi kepemimpinan yang tepat sesuai dengan tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

c. Akademis

Manfaat penelitian ini, dari perspektif akademis, terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik, khususnya terkait kajian komunikasi politik serta pola kepemimpinan di tingkat pemerintahan daerah. Studi perbandingan model komunikasi politik antara Anies Baswedan sebagai Gubernur dan Heru Budi Hartono sebagai Pj. Gubernur dalam membangun Jakarta memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana strategi dan pendekatan yang berbeda dapat memengaruhi pembangunan kota metropolitan terbesar di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam penyusunan penelitian, sehingga menghasilkan karya tulis yang terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika ini dirancang untuk memastikan pembahasan yang runtut dan kohesif, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bagian pembuka yang menjelaskan latar belakang penelitian secara mendalam. Pada bagian ini, penulis memulai dengan menggambarkan isu-isu umum yang berkaitan dengan topik penelitian, diikuti

dengan penjelasan spesifik mengenai masalah yang hendak diteliti. Identifikasi masalah dilakukan untuk memberikan landasan kuat terhadap fenomena yang menjadi fokus utama penelitian. Bab ini juga mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penulis menjelaskan kontribusi penelitian terhadap berbagai pihak, baik dari segi akademis, sosial, maupun praktis, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan bagi pemangku kebijakan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat pembahasan mengenai berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Kajian pustaka dilakukan dengan meninjau literatur yang mencakup aspek-aspek serupa baik dari segi subjek, objek, maupun pendekatan analisis. Bagian ini juga menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka analisis, yang menjadi alat untuk memahami dan menjelaskan temuan penelitian. Selain itu, disajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logis penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga pendekatan solusi yang diusulkan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas secara terperinci metode penelitian yang digunakan. Penulis menjelaskan pendekatan penelitian yang dipilih, baik kualitatif maupun kuantitatif, disertai dengan alasan pemilihannya. Selanjutnya, diuraikan proses penentuan informan atau sampel penelitian, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen, serta metode analisis data yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Bab ini juga mencakup lokasi penelitian dan jadwal pelaksanaannya sebagai gambaran waktu dan tempat penelitian dilakukan.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, penulis menyajikan deskripsi umum mengenai konteks penelitian. Bagian ini mencakup pengenalan terhadap profil wilayah, kondisi geografis, demografi, atau karakteristik lain yang relevan dengan fokus penelitian. Jika penelitian melibatkan pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah daerah atau

masyarakat setempat, penulis juga menjelaskan peran dan keterlibatan mereka dalam konteks penelitian. Gambaran umum ini memberikan landasan bagi pembaca untuk memahami latar belakang empiris penelitian secara lebih komprehensif.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data atau temuan yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diolah sesuai metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penulis mengintegrasikan temuan dengan permasalahan yang dirumuskan pada bab sebelumnya, sehingga mampu memberikan pemahaman baru atau perspektif yang berbeda terhadap topik penelitian.

BAB 6 PENUTUP

Bab terakhir merupakan bagian penutup yang berisi rangkuman dari keseluruhan pembahasan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang bersifat aplikatif maupun konseptual, sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagian ini menjadi penutup yang menghubungkan seluruh isi penelitian dalam satu kesatuan yang utuh.